



L A P O R A N
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI TERKAIT
PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2019
KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 22 - 24 JULI 2019

=====

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga representasi rakyat mempunyai tugas dan fungsi di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Berkaitan dengan kewenangan DPR RI dalam bidang pengawasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”, Komisi IX DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan di dalam rapat. Dalam hal hasil rapat intern Komisi IX DPR-RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan, ditetapkannya Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji.

Kegiatan ibadah haji secara terus menerus setiap tahun terus berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pelayanan kesehatan dalam mendukung proses ibadah haji tersebut setiap tahun mengalami proses perbaikan sehingga memberikan pelayanan yang prima bagi para peserta ibadah haji. Pada tahun-tahun terakhir, pelayanan kesehatan haji bagi para jemaah haji telah memberikan hasil yang sangat baik. Implementasi Permenkes No. 15 tahun 2016 yang dilengkapi dengan Siskahatkes telah memberi tuntunan kemudahan dalam proses pelayanan kesehatan haji.

Namun demikian, dalam setiap pelaksanaannya perlu pengawasan yang ketat agar pelayanan kesehatan haji dapat berjalan tertib memberi kenyamanan.

Jemaah haji, setiap tahunnya lebih dari 60% memiliki resiko tinggi pada sektor kesehatan, oleh karena sangat memerlukan profesionalisme dalam proses pelayanan kesehatan jemaah haji. Hal inilah yang menjadi perhatian secara khusus oleh Komisi IX DPR RI, agar proses pelayanan kesehatan haji dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kenyamanan peserta ibadah haji dari sejak awal keberangkatan hingga selesai dan kembali ke rumah masing-masing. Untuk itulah Panitia Kerja Pengawasan Kesehatan haji bekerja dan memikirkannya dalam setiap kesempatan dengan mitra kerja yang terkait. Semoga, pelaksanaan ibadah haji tahun 2019 ini, dapat berjalan lancar dengan dukungan pelayanan kesehatan yang prima.

B. DAERAH TUJUAN

Untuk mendapatkan masukan dalam rangka pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Haji, Komisi IX DPR-RI menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan (Embarkasi Banjarmasin) sebagai daerah tujuan program pengawasan ini. Adapun beberapa pertimbangan dan dasar pemikiran pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Embarkasi Haji Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- a. Embarkasi Haji Banjarmasin, untuk pertama kali pada tahun ini mendapatkan penggabungan dari jemaah haji dari Kalimantan Tengah;
- b. Embarkasi Haji Banjarmasin merupakan Embarkasi terbesar di Pulau Kalimantan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan kerja Spesifik ke Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Kunjungan kerja Spesifik dalam rangka pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji untuk mendapatkan penjelasan dan masukan

secara langsung mengenai Pelayanan Kesehatan Haji dari para pemangku kepentingan khususnya para jemaah haji yang ada di Embaarakasi Banjarmasin.

2. Tujuan diadakannya pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji, adalah untuk mengetahui :
 - a. Bagaimana kebijakan masing-masing pemangku kepentingan dalam melayanani Kesehatan Haji.
 - b. Apa Kendala yang dihadapi oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam penanganan dan antisipasi kasus Pelayanan Kesehatan Haji.

D. OUTPUT KUNJUNGAN KERJA KE KALIMANTAN SELATAN

1. Kegunaan dari kunjungan kerja adalah :
 - a. Komisi IX DPR-RI dapat memperoleh materi yang berupa masukan tentang Pelayanan Kesehatan Haji.
 - b. Komisi IX DPR-RI dapat memperoleh masukan bagaimana kebijakan masing-masing pemangku kepentingan dalam menangani dan mengantisipasi masalah yang terkait dengan Pelayanan Kesehatan Haji.
2. Output dari kunjungan kerja spesifik ini adalah laporan dan rekomendasi yang akan digunakan untuk melengkapi dan memperkaya kajian-kajian yang dilakukan oleh Komisi IX DPR-RI melalui pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji.

E. LEMBAGA-LEMBAGA YANG AKAN DIUNDANG

Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengawasan Pelayanan Kesehatan Hajike Provinsi Kalimantan Selatan ini telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait Pelayanan Kesehatan Haji:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
3. Embarkasi Haji Banjarmasin
4. Kementrian Kesehatan

5. BPJS Kesehatan

5.1. Pimpinan BPJS Kesehatan

5.2. Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan Kalimantan Selatan;

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisis IX dalam rangka Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji ini telah dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Juli 2019.

G. PESERTA

Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Anggota Panitia Kerja Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji, dengan dipimpin oleh Ibu. Dra. Hj. Ermalena, MHS., dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun susunan lengkap Anggota rombongan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan, terlampir :

NO	NO. ANGG.	N A M A	Keterangan	FRAKSI	DAPIL
1	A - 536	Dra. Hj. ERMALENA, MHS	Ketua Tim	PPP	NTB
2	A - 260	Ir. ICHSAN FIRDAUS	Anggota	F.Golkar	Jabar V
3	A - 349	drg. PUTIH SARI	Anggota	F.Gerindra	Jabar VII
4	A - 460	DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag.,M.Hum.,MA	Anggota	F.PAN	Sumut II
5	A - 202	ABIDIN FIKRI, SH	Anggota	PDIP	JATIM IX
6	A - 312	SYAMSUL BACHRI, M.Sc	Anggota	F. Golkar	Sulsel II
7	A - 349	Dr. SUIR SYAM.,M.Kes.MMR	Anggota	P Gerindra	Sumbar I
8	A - 433	dr. NOVA RIYANTI YUSUF	Anggota	F.Demokrat	Jatim VI
9	A - 499	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	Anggota	F. PAN	Kalteng
10	A - 40	HANDAYANI, SKM	Anggota	F. PKB	Jambi
11	A - 95	H. AHMAD ZAINUDIN,Lc	Anggota	F. PKS	DKI I
12	A - 534	KARTIKA YUDHISTI, b.Eng.,M.Sc	Anggota	F. PPP	Banten II
13	A - 560	JALALUDIN AKBAR R, SH	Anggota	F. Hanura	Sulsel I

---oo0oo---

H. TEMUAN dan REKOMENDASI

1. Temuan

- 1.1. Di Embarkasi Banjarmasin Terdapat 62% calon jemaah haji yang memiliki resiko tinggi;
 - 1.1.1. Resiko tinggi karena umur yang sudah usia lanjut (tertua usia 105 tahun).
 - 1.1.2. Resiko tinggi karena penyakit akut bawaan calon jemaah haji.
- 1.2. Tiga calon Jemaah haji tidak dapat diberangkatkan karena sakit dan belum sembuh sampai pada saat pemberangkatan.
- 1.3. Masih ditemukan Calon Jemaah haji yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, artinya untuk resiko kesehatan tidak menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan;
 - 1.3.1. Pimpinan BPJS Kesehatan menyatakan bahwa sudah ada MOU dengan Kementerian kesehatan tentang keharusan peserta Calon Jemaah Haji memiliki kartu BPJS Kesehatan.
 - 1.3.2. Pimpinan Kanwil Agama tidak tahu adanya MOU peserta Calon Haji harus memiliki kartu BPJS Kesehatan.
 - 1.3.3. Petugas di lapangan, dari pihak BPJS Kesehatan maupun Petugas Pelayanan Haji sama-sama tidak memahami
- 1.4. Buku kesehatan haji yang menjadi pegangan peserta Calon Jemaah Haji tidak representatif yang memberikan gambaran paripurna tentang kesehatan, dikhawatirkan kalau terjadi sesuatu akan menyulitkan penanganan terhadap Calon Haji yang bersangkutan.

2. Rekomendasi

- 2.1. Harus ada sinkronisasi antara BPJS Kesehatan dengan kementerian agama, sesuai dengan MOU yang telah disepakati; untuk itu Komisi IX DPR RI merekomendasikan agar BPJS Kesehatan harus menjemput bola dengan melakukan sosialisasi kepada Petugas Haji pada tingkat untuk memastikan keharusan Calon Haji memiliki kartu BPJS Kesehatan.
- 2.2. Buku Kesehatan Haji adalah pegangan yang penting, untuk itu Komisi IX DPR RI merekomendasikan agar Buku Kesehatan Haji dibuat yang representatif agar penanganan pelayanan kesehatan Jemaah haji dapat dilakukan dengan baik.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Tertulis Panja Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja Provinsi Kalimantan Selatan (Embarkasi Haji Banjarmasin) ini disampaikan. Atas perhatian dan jawaban dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Juli 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KETUA TIM,**

Ttd

Dra. Hj. ERMALENA, MHS.

A-536